

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Didalam suatu Negara, Pemerintah berperan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut butuh adanya pengeluaran – pengeluaran dan penerimaan yang harus ditampung oleh Pemerintah. Oleh karena itu adanya regulasi dan peraturan yang mengatur pengeluaran dan penerimaan kas tersebut. Pemerintah mendapatkan penerimaan kas bersumber dari pajak, non pajak dan hibah. Sumber penerimaan negara nantinya akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat serta dikembalikan lagi kepada rakyat dengan bentuk program bantuan atau pembangunan fasilitas umum. Sementara untuk pengeluaran kas yang dikeluarkan oleh pemerintah harus digunakan secara baik dan benar yang dimana manfaatnya dapat dirasakan oleh khalayak umum.

Penerimaan dan pengeluaran kas yang dipegang oleh Pemerintah merupakan uang negara yang harus dipertanggungjawabkan secara bijak dan benar. Seperti yang disebutkan oleh UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Keuangan Negara adalah segala hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang atau berupa barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkannya pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara tersebut, maka diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 mengenai Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada Pasal 1 bahwa Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disebut BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan adalah Pemeriksa yang melaksanakan tugas pemeriksaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan Negara.

Berhubungan dengan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara maka dalam UUD 1945 Bab VIIIA Pasal 23E tentang Badan Pemeriksa Keuangan dijelaskan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara diadakan

satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Dari berkaitannya pasal tersebut sudah dipastikan bahwa tugas BPK adalah melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada suatu entitas. Pemeriksaan entitas dibagi berdasarkan tujuh anggota BPK, dan dalam hal ini praktikan berada di Auditorat Keuangan Negara 1 yang dimana ada dua puluh lembaga yang harus diperiksa. Untuk melaksanakan tugasnya dibutuhkan penugasan diluar kantor untuk melakukan pemeriksaan pada entitas tersebut. Penugasan pemeriksaan yang dilakukan dibutuhkan perjalanan keluar tempat-tempat yang dituju yang jaraknya minimal 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia ataupun ditempat-tempat yang berada diluar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat Yang Berwenang yang disebut sebagai perjalanan dinas.

Dalam melaksanakan perjalanan dinas adanya pembiayaan atau pemberian uang atas penugasan pemeriksaan yang dipergunakan untuk perjalanan dinas tersebut. Untuk pemberian uang atas perjalanan dinas tersebut adanya proses pengajuan yang harus dilakukan oleh Pelaksana perjalanan dinas dan *Liaison Officer* (LO) Subbagian Adm Keuangan hingga proses pertanggung jawaban untuk pemakaian uang yang diterima atas perjalanan dinas yang telah dilakukan. Dalam memproses pembiayaan atas perjalanan dinas dari pengajuan hingga pertanggungjawaban dibutuhkannya pengoptimalan dalam hal pencairan hingga proses pertanggungjawaban. Pengoptimalan tersebut membutuhkan pemanfaatan teknologi informasi untuk memudahkan proses pengadministrasian perjalanan dinas secara efektif dan efisien serta mengantisipasi resiko keterlambatan atas proses pencairan dan mempertanggungjawaban perjalanan dinas. Meminimalisir resiko keterlambatan maka Badan Pemeriksa Keuangan menggunakan aplikasi *software* yang bernama Aman Perjadin dan Aplikasi Jaldisku yang bertujuan untuk memudahkan pengadministrasian perjalanan dinas dengan secara efektif, efisien dan akuntabel. Kedua aplikasi tersebut merupakan gagasan terbaru bagi Badan Pemeriksa Keuangan yang mana aplikasi ini tidak semua instansi memakai aplikasi tersebut terutama aplikasi jaldisku yang dibuat hanya untuk satuan kerja Auditorat

Keuangan Negara I. Pemafaatan teknologi oleh Badan Pemeriksa Keuangan sendiri pun memiliki peran penting juga bagi sistem informasi. Sistem informasi yang dibutuhkan secara akurat dan tepat waktu membutuhkan bantuan teknologi. Oleh karena dibutuhkannya informasi-informasi yang akurat dan tepat waktu pada dasarnya dihasilkan oleh suatu sistem informasi yang berbasis komputer. Sistem komputerisasi ini yang nantinya sangat membantu pengadministrasian perjalanan dinas di Badan Pemeriksa Keuangan yang mana sistem komputerisasi ini bernama aplikasi Aman Perjadin dan Jaldisku.

Berdasarkan pada pembahasan diatas maka penulis tertarik untuk membahas mengenai bagaimana proses administrasi perjalanan dinas dari pencairan hingga pertanggungjawaban biaya untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Auditorat Keuangan Negara I Badan Pemeriksa Keuangan RI. Dengan begitu penulis melakukan tinjauan lebih lanjut yang dijelaskan dalam Laporan Tugas Akhir yang berjudul **“Prosedur Atas Perjalanan Dinas Pada Auditorat Keuangan Negara I Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia”**

I.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan laporan Tugas Akhir dan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui prosedur atas perjalanan dinas pada Auditorat Keuangan Negara I Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- b. Untuk mengetahui lebih detail mengenai prosedur perjalanan dinas mulai pengadministrasian pengajuan tagihan hingga proses pelaporan pertanggungjawaban pada Auditorat Keuangan Negara I Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- c. Untuk mengetahui dokumen apa saja yang digunakan dalam proses pengajuan tagihan serta pertanggungjawaban perjalanan dinas di Auditorat Keuangan Negara I Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

I.3 Manfaat

Sesuai dengan tujuan dilaksanakannya Pratik Kerja Lapangan, maka manfaat penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Laporan tugas akhir ini berguna sebagai mengembangkan ilmu dan kreatifitas, serta meningkatkan pemikiran ilmiah dan kritis berdasarkan ilmu yang didapat semasa bangku perkuliahan khususnya berkaitan dengan Prosedur atas Perjalanan Dinas Pada Auditorat Keuangan Negara I Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

2. Secara Praktis

a. Bagi penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan akan prosedur perjalanan dinas dan komponen biaya yang digunakan untuk perjalanan dinas pada Auditorat Keuangan Negara I Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

b. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Sebagai wadah memperkenalkan kepada para pembaca mengenai prosedur perjalanan dinas dengan fasilitas aplikasi yang hanya ada pada entitas Badan Pemeriksa Keuangan dan kegunaan aplikasi tersebut terhadap administrasi perjalanan dinas

c. Bagi Universitas

Sebagai acuan pembelajaran untuk para pembaca serta referensi khususnya untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Laporan ini dapat menjadi acuan untuk Laporan Tugas Akhir di masa mendatang.